

Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Arsitektur Perbankan Indonesia

- Suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan (Bank Indonesia, 2004)

V i s i :

- Mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

**P
i
l
a
r**

1

**Penguatan
Struktur
Perbankan
Nasional**

**P
i
l
a
r**

2

**Peningkatan
Kualitas
Pengaturan
Perbankan**

**P
i
l
a
r**

3

**Peningkatan
Fungsi
Pengawasan**

**P
i
l
a
r**

4

**Peningkatan
Kualitas
Manajemen &
Operasional
Perbankan**

**P
i
l
a
r**

5

**Pengembangan
Infrastruktur
Perbankan**

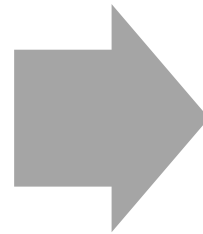
**P
i
l
a
r**

6

**Peningkatan
Perlindungan
Nasabah**

Pilar 1

**Program Penguatan Struktur
Perbankan Nasional**



Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan

Tujuan

- Memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan

Cara mencapainya

1

- Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru;

2

- Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru;

3

- Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal;

4

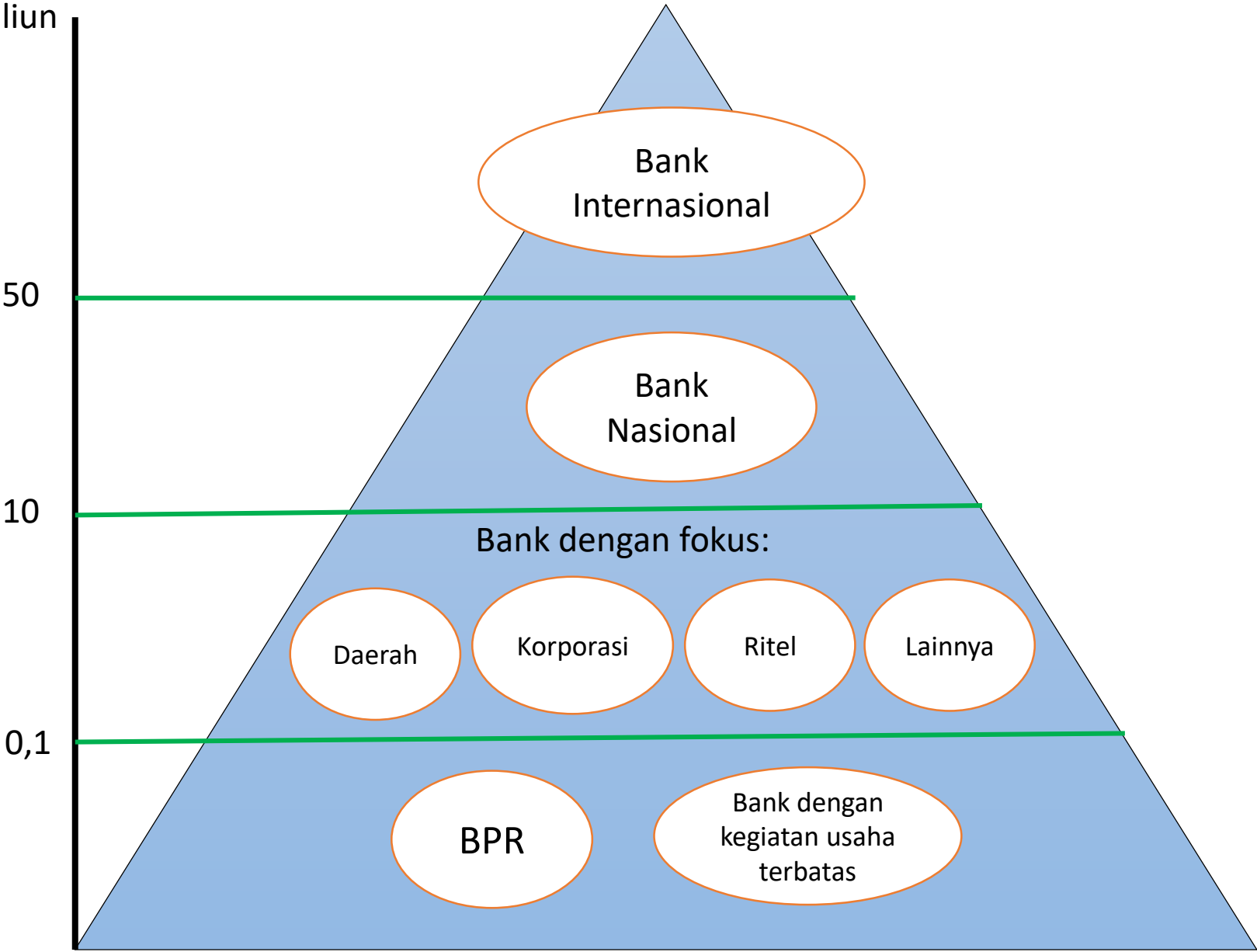
- Penerbitan subordinated loan

Target Capaian 10-15 tahun ke depan

- 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun;
- 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun;
- 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

Permodalan

Rp triliun



Kegiatan

1

- Memperkuat permodalan Bank

2

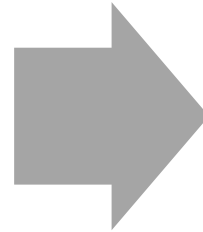
- Memperkuat daya saing dan kelembagaan BPR dan BPRS

3

- Meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM

Pilar 2

**Program Peningkatan Kualitas
Pengaturan Perbankan**



*Menciptakan sistem pengaturan dan
pengawasan bank yang efektif dan
mengacu pada standar internasional*

Tujuan

- Meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices

Cara mencapainya

1

- penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan

2

- Merger dengan bank penerapan 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh

Standar Basel adalah standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). BCBS adalah salah satu komite dalam Bank for International Settlements (BIS) yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. BCBS terdiri atas 45 Bank Sentral dan Otoritas pengawasan bank dari 29 Negara.

Target Capaian

- Lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan international best practices termasuk 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.
- Dua tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

Kegiatan

1

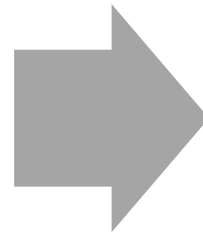
- Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan

2

- Implementasi secara bertahap international best practices

Pilar 3

**Program Peningkatan Fungsi
Pengawasan**



Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko

Tujuan

- Meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia

Cara mencapainya

- 1 • Peningkatkan kompetensi pemeriksa bank
- 2 • Peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas
- 3 • Pengembangan pengawasan berbasis risiko
- 4 • Peningkatkan efektivitas enforcement
- 4 • Konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia

Target Capaian

- Dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain

Kegiatan

1

- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain

2

- Melakukan reorganisasi sector perbankan di Bank Indonesia

3

- Menyempurnakan Infrastruktur Pendukung Pengawasan Bank

4

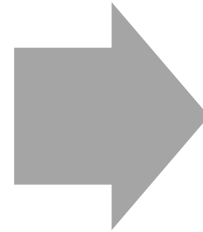
- Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko

5

- Meningkatkan efektivitas enforcement

Pilar 4

**Program Peningkatan Kualitas
Manajemen dan Operasional
Perbankan**



*Menciptakan good corporate
governance dalam rangka memperkuat
kondisi internal perbankan nasional*

Tujuan

- Meningkatkan good corporate governance (GCG), kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen

Cara mencapainya

- Menaikkan standar GCG yang didukung dengan kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan

Target Capaian

- Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat.

Kegiatan

1

- Meningkatkan Good Corporate Governance

2

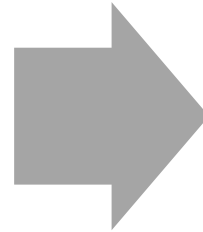
- Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan

3

- Meningkatkan kemampuan operasional bank

Pilar 5

**Program Pengembangan
Infrastruktur Perbankan**



*Mewujudkan infrastruktur yang
lengkap untuk mendukung terciptanya
industri perbankan yang sehat*

Tujuan

- Mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti credit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit

Cara mencapainya

- Mengembangkan credit bureau guna membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya.
- Menggunakan lembaga pemeringkat kredit dalam publicly-traded debt yang dimiliki bank guna meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan.
- Mengembangkan skim penjaminan kredit guna meningkatkan akses kredit bagi masyarakat

Target Capaian

- Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

Kegiatan

1

- Mengembangkan Credit Bureau

2

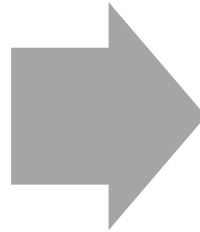
- Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah (Islamic Financial Market)

3

- Peningkatan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah

Pilar 6

**Program Peningkatan
Perlindungan Nasabah**



*Mewujudkan pemberdayaan dan
perlindungan konsumen jasa
perbankan*

Tujuan

- Memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah

Cara mencapainya

- Menetapkan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah
- Mendirikan lembaga mediasi independen
- Meningkatkan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah

Target Capaian

- Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

Kegiatan

1

- Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah

2

- Membentuk lembaga mediasi independen

3

- Menyusun transparansi informasi produk

4

- Mempromosikan edukasi untuk nasabah

Referensi

- Otoritas Jasa Keuangan, 2024. <https://ojk.go.id/id/>